

National Education Standards (SNP) as a Benchmark for Educational Quality in Indonesia: A Library Research Review on Implementation, Challenges, and Strengthening Strategies

Himmah Al Ulya^a| Hanun Asrohah^a

^aPendidikan Agama Islam, Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Correspondence: himmahalulya02@gmail.com

Article History:

Received: 12 August 2026

Accepted: 13 September 2026

Keyword:

National Education Standards,
Quality Assurance,
Educational Quality,
Internal Quality Assurance.

Abstract

The quality of education in Indonesia encompasses not only learning outcomes but also the quality of processes, management, educators, and the sustainability of quality assurance. While numerous studies have addressed the National Education Standards (SNP), prior research has largely focused on case studies of individual educational institutions and descriptive assessments of standard attainment. There remains a lack of comprehensive research synthesizing the role of the SNP as a quality benchmark in relation to quality assurance, quality culture, and continuous quality improvement. This study aims to analyze the position of the SNP as a benchmark for educational quality, the implementation of the eight standards, and strategies for strengthening them from a quality assurance perspective. A qualitative approach utilizing library research methods was employed. Data sources including scholarly articles, academic books, and regulations selected for their relevance and credibility were gathered via Google Scholar, GARUDA, and official government websites. Analysis was conducted using content analysis techniques, involving coding, categorization, cross-source comparison, and thematic synthesis. The findings indicate that while the SNP serves as a quality reference framework, formal compliance with the standards does not automatically result in improved quality; the primary gap lies in the practical application of these standards. This synthesis highlights the necessity of strengthening the Internal Quality Assurance System (SPMI), educator capacity, leadership, data utilization, and collaboration to shift the SNP orientation from mere compliance toward continuous improvement.

© 2026 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License) 

How to Cite:

Al Ulya, H., & Asrohah, H. (2026). National Education Standards (SNP) as a Benchmark for Educational Quality in Indonesia: A Library Research Review on Implementation, Challenges, and Strengthening Strategies. *MISOOL: Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(1), 207–216. <https://doi.org/10.47945/misool.v8i1.3325>

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Perubahan lingkungan Pendidikan yang di pengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan terhadap kompetensi peserta didik pada abad ke-21 menempatkan peningkatan mutu sebagai agenda yang tidak hanya berkaitan dengan pencapaian hasil belajar, tetapi juga dengan kualitas proses, pengelolaan satuan pendidikan, profesionalitas pendidik, dan keberlanjutan sistem penjaminan mutu. Dalam konteks tersebut, pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan mutu yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. SNP berfungsi sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan (Fiandi & Sesmiarni, 2023).

Keberadaan SNP menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan secara tidak teratur, melainkan harus dibangun melalui sistem yang terstandar. Delapan standar yang terdapat dalam SNP menjadi instrumen untuk mengarahkan seluruh komponen pendidikan, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan. Melalui standar tersebut pemerintah

berupaya menciptakan keselarasan mutu pendidikan di berbagai daerah yang memiliki karakteristik dan sumber daya yang berbeda-beda (Sulistiyanto et al., 2023).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa SNP memiliki peran penting dalam mendukung penjaminan mutu pendidikan. Penelitian Safitri dan Julaiha menemukan bahwa SNP berfungsi sebagai kerangka utama dalam peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan kualitas sekolah. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi guru, ketimpangan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi kebijakan Pendidikan (Safitri & Julaiha, 2026). Penelitian Arisandi dan Lubis juga menunjukkan bahwa penerapan delapan standar pendidikan nasional mampu meningkatkan mutu lembaga pendidikan apabila didukung oleh manajemen sekolah yang efektif dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa standar yang belum terlaksana secara optimal sehingga memerlukan penguatan dalam aspek implementasi dan evaluasi mutu (Arisandy & Lubis, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi SNP, sebagian besar penelitian masih berfokus pada studi kasus di sekolah atau madrasah tertentu serta lebih banyak menyoroti tingkat ketercapaian standar pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menjelaskan bagaimana SNP diterapkan dalam praktik pendidikan, tetapi belum banyak mengkaji SNP sebagai acuan mutu pendidikan secara komprehensif dalam perspektif penjaminan mutu nasional. Selain itu, kajian yang ada cenderung menempatkan SNP sebagai instrumen administratif yang harus dipenuhi oleh sekolah, sementara analisis mengenai posisi SNP sebagai fondasi budaya mutu pendidikan masih relatif terbatas (Heriyadi et al., 2025).

Pemetaan terhadap kajian-kajian di atas memperlihatkan pola yang cukup konsisten: penelitian mengenai SNP umumnya (1) berfokus pada studi kasus di satu sekolah atau madrasah, (2) mengukur tingkat ketercapaian standar secara deskriptif, dan (3) memposisikan SNP terutama sebagai instrumen administratif untuk kebutuhan akreditasi (Fiandi & Sesmiarni, 2023; Arisandy & Lubis, 2024; Heriyadi et al., 2025). Sejauh penelusuran penulis, belum banyak ditemukan kajian kepustakaan yang secara khusus mensintesis SNP sebagai instrumen strategis pembentukan budaya mutu dalam satu kerangka analisis yang mengintegrasikan sekaligus perspektif kebijakan pendidikan, manajemen mutu, dan implementasi di lapangan. Kekosongan inilah yang menjadi kontribusi konseptual utama dari kajian ini, yaitu menempatkan SNP tidak sekadar sebagai daftar indikator kepatuhan, melainkan sebagai fondasi budaya mutu yang dibangun secara berkelanjutan. Kajian ini juga menjadi relevan mengingat perubahan kebijakan pendidikan nasional pascaditerbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagai landasan normatif utama SNP regulasi yang lebih lama tetap relevan disebut sebagai konteks historis, sementara penjelasan mengenai ruang lingkup dan operasionalisasi SNP pada bagian selanjutnya dalam artikel ini merujuk pada kerangka regulasi yang berlaku saat ini.

Mutu pendidikan juga perlu dipahami sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Ukuran mutu tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik peserta didik, tetapi juga oleh kesesuaian kurikulum, kualitas proses pembelajaran, kapasitas pendidik, tata kelola satuan pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan lembaga melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Perspektif tersebut sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan peningkatan mutu sebagai proses yang harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkesinambungan. Karena itu, keberadaan SNP menjadi penting bukan semata-mata untuk menyeragamkan penyelenggaraan pendidikan, tetapi untuk menyediakan titik rujuk yang memungkinkan satuan pendidikan mengetahui posisi mutunya dan menentukan prioritas perbaikan (Adien et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, SNP dapat dipahami sebagai jembatan antara kebijakan pendidikan nasional dan praktik pada tingkat satuan pendidikan. Standar memberikan batas minimal yang harus diperhatikan, sedangkan satuan pendidikan memiliki ruang untuk menerjemahkannya sesuai karakteristik peserta didik, lingkungan, dan sumber daya yang tersedia. PP Nomor 57 Tahun 2021 menegaskan bahwa SNP menjadi kriteria minimal berbagai aspek pendidikan dan digunakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa standar nasional tidak hanya relevan untuk sekolah tertentu,

tetapi menjadi bagian dari kerangka penyelenggaraan pendidikan secara luas. Perubahan melalui PP Nomor 4 Tahun 2022 juga menunjukkan bahwa kebijakan SNP terus disesuaikan agar tetap selaras dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan sistem pendidikan (Asmara, 2021).

Persoalan yang kemudian muncul bukan lagi apakah standar telah tersedia, melainkan bagaimana standar tersebut diterjemahkan menjadi praktik mutu. Pada satuan pendidikan, pemenuhan standar dapat menghasilkan dua kemungkinan. Pertama, standar diperlakukan sebagai daftar persyaratan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan administrasi dan akreditasi. Kedua, standar digunakan sebagai instrumen refleksi untuk membaca kesenjangan, menetapkan target, mengembangkan program, dan mengevaluasi perubahan. Perbedaan orientasi tersebut penting karena pemenuhan administratif belum tentu menunjukkan bahwa proses pendidikan telah mengalami perbaikan substantif. Dengan kata lain, efektivitas SNP bergantung pada kemampuan organisasi pendidikan mengubah standar dari dokumen normatif menjadi praktik pengelolaan mutu yang hidup (Dedik et al., 2025).

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana SNP berfungsi sebagai acuan mutu pendidikan nasional, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta kontribusinya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berdaya saing di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai kerangka acuan mutu pendidikan di Indonesia. Studi kepustakaan dipilih karena objek penelitian berupa dokumen, regulasi, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan kebijakan dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris yang diperoleh melalui observasi atau wawancara, tetapi memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan sebagai bahan utama untuk membangun interpretasi dan sintesis konseptual (Sari & Asmendi, 2020).

Pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran beberapa sumber ilmiah dan resmi, yaitu Google Scholar, GARUDA, serta laman resmi pemerintah yang menyediakan regulasi pendidikan. Penelusuran artikel ilmiah menggunakan kombinasi kata kunci “Standar Nasional Pendidikan”, “SNP”, “mutu pendidikan”, “penjaminan mutu pendidikan”, “SPMI”, “budaya mutu”, dan “continuous quality improvement”. Kata kunci tersebut digunakan secara kombinatorial untuk memperoleh literatur yang membahas hubungan antara SNP, sistem penjaminan mutu, dan peningkatan mutu pendidikan. Selain artikel ilmiah, penelitian juga menggunakan regulasi pendidikan sebagai sumber hukum atau normatif primer, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Nasional Pendidikan.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber, penelusuran literatur, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, pemeriksaan kesesuaian isi, pengelompokan sumber berdasarkan tema, analisis isi, dan sintesis hasil. Setiap sumber yang lolos seleksi kemudian dipetakan berdasarkan fokus pembahasannya, seperti konsep SNP, sistem penjaminan mutu, SPMI, budaya mutu, continuous quality improvement, dan implementasi standar dalam peningkatan mutu pendidikan. Pemetaan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kecenderungan pembahasan, serta ruang kajian yang belum memperoleh perhatian secara memadai dalam penelitian sebelumnya.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis (analisis isi). Analisis tidak dilakukan dengan memperlakukan seluruh dokumen sebagai jenis sumber yang sama, tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sumber. Regulasi dianalisis untuk mengidentifikasi ketentuan normatif mengenai SNP dan penyelenggaraan pendidikan, sedangkan artikel ilmiah dan buku dianalisis untuk mengidentifikasi konsep, temuan penelitian, argumentasi, serta perspektif teoretis mengenai mutu dan penjaminan mutu pendidikan. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi informasi, pengkodean tema, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis antar sumber.

Tema analisis ditentukan berdasarkan fokus penelitian dan konsep yang muncul secara konsisten dalam literatur, yaitu SNP sebagai acuan mutu, penjaminan mutu pendidikan, SPMI, budaya mutu, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan. Untuk mengurangi subjektivitas dalam interpretasi, setiap

argumentasi tidak didasarkan pada satu sumber secara terpisah, tetapi dibandingkan dengan sumber lain yang relevan. Validasi dilakukan melalui pemeriksaan silang antarsumber (cross-checking) dengan membandingkan regulasi, literatur konseptual, dan hasil penelitian terdahulu. Dengan cara tersebut, interpretasi yang dihasilkan diupayakan memiliki dasar yang konsisten dan tidak semata-mata bergantung pada perspektif peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam berbagai literatur yang ditempatkan sebagai kerangka acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu di Indonesia. Namun, pemaknaan SNP dalam penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan yang tidak sepenuhnya seragam. Sebagian kajian menempatkan SNP terutama sebagai instrumen untuk memastikan keterpenuhan standar pada tingkat satuan pendidikan, sedangkan kajian lainnya melihat SNP sebagai bagian dari sistem yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan mutu dan menentukan arah perbaikan. Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bahwa SNP memiliki dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu sebagai acuan normatif mengenai mutu yang perlu dicapai dan sebagai titik rujukan dalam proses evaluasi serta peningkatan mutu pendidikan (Safitri & Julaiha, 2026).

SNP Sebagai Instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan

Implementasi antara SNP dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) juga memperlihatkan adanya perbedaan posisi konseptual yang perlu dibedakan. SNP berfungsi menetapkan kerangka standar yang menjadi rujukan mutu, sedangkan SPMI merupakan mekanisme internal yang digunakan satuan pendidikan untuk memastikan standar tersebut diterapkan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan. Dengan demikian, SNP tidak identik dengan SPMI. SNP menentukan arah dan kriteria mutu, sementara SPMI menyediakan mekanisme pengelolaan mutu pada tingkat satuan pendidikan. Hubungan keduanya bersifat fungsional karena keberadaan standar membutuhkan mekanisme implementasi dan evaluasi agar tidak berhenti sebagai ketentuan normative (Maulana & Suwadi, 2024).

Temuan tersebut dapat diperluas melalui perspektif continuous quality improvement, yang memandang peningkatan mutu sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi terhadap kondisi yang telah dicapai. Dalam perspektif Total Quality Management (TQM) yang dikemukakan oleh Edward Sallis, mutu bukan hanya diukur dari hasil akhir, tetapi dari kemampuan organisasi melakukan continuous improvement (Indah et al., 2024). Oleh karena itu, implementasi SNP tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan delapan standar secara administratif, melainkan sebagai proses pembentukan budaya mutu yang melibatkan seluruh unsur sekolah.

Perbandingan temuan Fikri, Fitri, dan Muhajir juga menunjukkan bahwa penerapan SNP merupakan bagian penting dari sistem penjaminan mutu pendidikan. Mereka menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada penyusunan standar, melainkan pada konsistensi implementasi di tingkat satuan pendidikan. Pemenuhan standar kompetensi lulusan, standar pendidik, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan masih menjadi aspek yang memerlukan perhatian serius agar mutu pendidikan dapat meningkat secara merata (Fikri et al., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan standar belum secara otomatis menghasilkan praktik mutu yang seragam. Perbedaan kapasitas sumber daya, kemampuan manajerial, kompetensi pendidik, serta kondisi lingkungan pendidikan memengaruhi kemampuan masing-masing satuan pendidikan dalam menerjemahkan standar ke dalam praktik.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika SNP diterapkan dalam lingkungan satuan pendidikan yang memiliki kapasitas berbeda. Namun demikian, hasil kajian dari Arisandy dan Lubis juga menemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan sebagian satuan pendidikan memandang SNP sebagai instrumen administratif yang berorientasi pada pemenuhan dokumen akreditasi. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi SNP lebih berfokus pada pencapaian indikator formal daripada membangun sistem mutu yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal SNP sebagai instrumen penjaminan mutu dengan realitas implementasinya di lapangan (Arisandy & Lubis, 2024).

Dalam konteks ini juga, SNP menjadi instrumen yang memberikan arah mengenai kualitas yang harus

dicapai, sedangkan penjaminan mutu memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar tersebut. Artinya, mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh capaian akademik peserta didik, tetapi juga oleh efektivitas manajemen sekolah, kompetensi pendidik, kualitas pembelajaran, serta sistem evaluasi yang diterapkan (Safitri & Julaiha, 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas SNP sebagai instrumen penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan budaya mutu. Apabila SNP hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, maka standar yang telah ditetapkan tidak akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Sebaliknya, apabila SNP dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan program, evaluasi, dan inovasi pembelajaran, maka SNP akan berfungsi sebagai instrumen strategis yang mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, sintesis literatur menunjukkan bahwa SNP memiliki posisi penting sebagai titik acuan dalam penjaminan mutu, tetapi keberadaannya tidak dengan sendirinya menjamin terjadinya peningkatan kualitas pendidikan. Kontribusi SNP terhadap mutu akan lebih bermakna apabila standar diintegrasikan dengan mekanisme penjaminan mutu internal dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, SNP lebih tepat diposisikan sebagai quality reference framework, sedangkan peningkatan mutu merupakan proses kelembagaan yang membutuhkan mekanisme, kapasitas, dan budaya organisasi yang mendukung.

Jika hubungan SNP dan SPMI dilihat secara lebih kritis, tampak bahwa keduanya membentuk relasi antara “apa yang harus dicapai” dan “bagaimana perbaikan dilakukan”. SNP menyediakan referensi eksternal yang relatif seragam, sedangkan SPMI memberi ruang bagi satuan pendidikan untuk melakukan diagnosis terhadap kondisi internalnya. Perbedaan fungsi tersebut justru menjadi kekuatan apabila keduanya tidak dipisahkan dalam praktik. Ketika hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar tertentu belum tercapai, informasi tersebut seharusnya tidak berhenti pada laporan, tetapi diterjemahkan menjadi prioritas program, pembagian tanggung jawab, kebutuhan pengembangan kompetensi, serta alokasi sumber daya. Kajian mengenai integrasi SPMI menunjukkan bahwa mekanisme internal dapat membantu satuan pendidikan menghubungkan evaluasi dengan tindakan perbaikan, sehingga standar memiliki fungsi yang lebih operasional (Sridana et al., 2018).

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa budaya mutu merupakan unsur penghubung yang sering kali tidak tampak dalam indikator formal. Budaya mutu berkaitan dengan kebiasaan organisasi dalam menggunakan data, berdiskusi mengenai masalah pembelajaran, menerima umpan balik, melakukan refleksi, dan memperbaiki program berdasarkan hasil evaluasi. Jika kebiasaan tersebut belum terbentuk, pemenuhan SNP berisiko menjadi kegiatan periodik yang meningkat ketika akreditasi atau evaluasi eksternal mendekat, tetapi melemah setelah proses penilaian selesai. Sebaliknya, ketika evaluasi menjadi rutinitas organisasi, standar dapat berfungsi sebagai bahasa bersama bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk membahas kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, budaya mutu bukan standar tambahan di luar SNP, melainkan kondisi kelembagaan yang memungkinkan standar bekerja secara efektif.

Implementasi Delapan Standar Nasional Pendidikan

Implementasi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam literatur menunjukkan bahwa setiap standar memiliki fungsi yang berbeda, tetapi ketercapaiannya saling berhubungan. Menempatkan delapan standar sebagai komponen yang membentuk satu sistem, sehingga kelemahan pada salah satu komponen dapat berimplikasi terhadap komponen lainnya (Mesiono et al., 2022). Oleh karena itu, implementasi SNP tidak dapat dilakukan secara terpisah, tetapi harus dilaksanakan secara terpadu melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkelanjutan.

Ruang lingkup SNP yang meliputi delapan standar nasional pertama kali dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005, dan kerangka delapan standar tersebut tetap dipertahankan dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya melalui PP No. 4 Tahun 2022, yang kini menjadi landasan normatif SNP yang berlaku, yaitu: (Felisa et al., 2024)

Untuk Standar kompetensi lulusan, literatur menempatkan standar kompetensi lulusan sebagai orientasi akhir dari penyelenggaraan pendidikan. Namun, pencapaian kompetensi lulusan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan hasil evaluasi peserta didik. Temuan mengenai keterkaitan antara kompetensi lulusan dengan standar proses, pendidik, isi, dan penilaian menunjukkan bahwa kualitas lulusan merupakan hasil interaksi berbagai komponen pendidikan. Dengan demikian, apabila satuan pendidikan hanya berorientasi pada capaian hasil akhir tanpa memperbaiki proses yang mendukungnya, maka pemenuhan standar kompetensi lulusan berpotensi bersifat parsial.

Implementasi standar isi berkaitan dengan kemampuan satuan pendidikan menerjemahkan kerangka kurikulum ke dalam pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Literatur menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kualitas isi pembelajaran dipengaruhi oleh kemampuan pendidik dan satuan pendidikan dalam melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik. Persoalannya, fleksibilitas dalam pengembangan pembelajaran tidak selalu diikuti oleh kapasitas yang sama pada setiap satuan pendidikan. Hal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan standar dan kemampuan implementasi di tingkat satuan pendidikan.

Sementara itu, untuk standar proses, Temuan dalam literatur memperlihatkan bahwa pemenuhan standar proses tidak cukup diukur melalui keberadaan perangkat administrasi pembelajaran. Yang lebih penting adalah bagaimana perencanaan tersebut diwujudkan dalam praktik pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif. Pada titik ini, *constructivist learning theory/approach* dapat digunakan sebagai perspektif pendukung untuk menjelaskan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Namun, teori konstruktivisme tidak digunakan sebagai teori untuk menjelaskan SNP secara keseluruhan, melainkan sebagai landasan pedagogis untuk memahami salah satu dimensi implementasi standar proses. Dengan pembatasan tersebut, hubungan antara teori dan objek analisis menjadi lebih proporsional.

Implementasi standar penilaian tidak hanya menyangkut penggunaan instrumen evaluasi, tetapi juga bagaimana informasi hasil penilaian digunakan dalam proses pembelajaran. Penilaian yang hanya menghasilkan skor tanpa ditindaklanjuti dengan umpan balik memiliki keterbatasan dalam mendukung peningkatan mutu. Oleh karena itu, kesenjangan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata apakah satuan pendidikan telah melakukan penilaian, tetapi apakah hasil penilaian digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dan memperbaiki proses pembelajaran.

Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, Literatur yang dikaji secara konsisten memberikan perhatian terhadap kapasitas pendidik sebagai salah satu komponen penting dalam implementasi SNP. Namun, konsistensi perhatian tersebut tidak dapat secara otomatis diterjemahkan menjadi kesimpulan bahwa kompetensi guru merupakan “faktor yang paling menentukan” atau memiliki pengaruh kausal terbesar terhadap mutu pendidikan. Oleh karena itu, temuan yang lebih tepat adalah bahwa kompetensi pendidik merupakan salah satu kondisi penting yang berulang kali muncul dalam literatur ketika membahas keberhasilan implementasi standar, terutama standar proses dan penilaian

Standar sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat memengaruhi kualitas implementasi SNP. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai lebih mudah memenuhi indikator mutu dibandingkan sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi penyebab implementasi delapan standar belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pemerataan mutu pendidikan sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan SNP belum sepenuhnya tercapai (Henry et al., 2025).

Standar pengelolaan memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan seluruh standar pendidikan. Pengelolaan sekolah yang efektif memungkinkan seluruh program pendidikan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata sekolah, didukung oleh sistem evaluasi yang terukur, serta diarahkan pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sebaliknya, lemahnya manajemen sekolah akan berdampak terhadap rendahnya efektivitas implementasi standar lainnya. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SNP tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola organisasi pendidikan (Dedik et al., 2025). Terakhir, standar pembiayaan berhubungan dengan pengelolaan

keuangan sekolah. Standar pembiayaan mencakup alokasi dan penggunaan dana pendidikan secara transparan dan efisien (Safitri & Julaiha, 2026).

Jika dibandingkan secara keseluruhan, literatur memperlihatkan bahwa persoalan implementasi delapan SNP tidak hanya berada pada masing-masing standar, tetapi juga pada hubungan antar komponen. Keterbatasan sarana dapat menghambat proses pembelajaran; kapasitas pendidik dapat memengaruhi kualitas penerapan kurikulum dan penilaian; sementara pengelolaan dan pembiayaan menentukan sejauh mana berbagai kebutuhan tersebut dapat direspons. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa delapan SNP perlu diperlakukan sebagai suatu sistem yang saling berkaitan, bukan sebagai delapan target administratif yang berdiri sendiri. (Sihombing et al., 2026)..

Dengan demikian, kesenjangan antara standar dan praktik terutama terlihat pada perbedaan antara keterpenuhan formal dan kapasitas aktual satuan pendidikan dalam menerapkan standar. Oleh karena itu, evaluasi SNP sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah indikator telah terpenuhi, tetapi dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai bagaimana indikator tersebut diterapkan, apa hambatnya, dan apakah hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan. Perspektif tersebut menggeser pemahaman SNP dari sekadar *compliance* menuju *improvement*, sehingga penjaminan mutu memiliki orientasi yang lebih substantif.

Keterkaitan antar standar tersebut dapat dijelaskan melalui alur mutu yang bersifat sistematis. Standar isi menyediakan arah materi dan pengalaman belajar, standar proses menerjemahkannya ke dalam kegiatan pembelajaran, standar penilaian menghasilkan informasi mengenai capaian belajar, sedangkan standar kompetensi lulusan menjadi orientasi hasil yang hendak dicapai. Pada saat yang sama, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan menyediakan kondisi pendukung agar proses utama tersebut dapat berjalan. Karena itu, kelemahan pada komponen pendukung dapat mengurangi efektivitas komponen inti. Sintesis ini memperkuat argumen bahwa pengukuran mutu tidak tepat jika hanya mengambil satu standar sebagai representasi keseluruhan kualitas sekolah (Jumadi et al., 2025).

Pada standar isi dan standar proses, kesenjangan antara kebijakan dan praktik tampak terutama pada kemampuan adaptasi. Dokumen kurikulum dapat tersedia secara lengkap, tetapi kualitas pengalaman belajar tetap bergantung pada bagaimana guru menginterpretasikan tujuan pembelajaran, memilih strategi, menggunakan sumber belajar, dan memberi ruang kepada peserta didik untuk aktif. Karena itu, penguatan standar proses perlu disertai pengembangan kapasitas pedagogis dan forum berbagi praktik baik. Hal yang sama berlaku pada standar penilaian. Penilaian akan memberi kontribusi terhadap mutu apabila hasilnya dibaca untuk memberikan umpan balik, memperbaiki pembelajaran, dan menentukan tindak lanjut bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran (Athirah et al., 2025).

Dengan demikian, hasil sintesis delapan standar mengarah pada satu kesimpulan analitis. implementasi SNP lebih tepat dinilai berdasarkan kualitas hubungan antarkomponen daripada sekadar jumlah indikator yang terpenuhi. Sekolah dapat memiliki dokumen yang lengkap, tetapi apabila hasil evaluasi tidak digunakan untuk memperbaiki pembelajaran, pemenuhan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan budaya mutu. Sebaliknya, sekolah yang menggunakan data untuk mengidentifikasi kesenjangan, menetapkan prioritas, melaksanakan intervensi, dan mengevaluasi hasilnya sedang menunjukkan fungsi SNP yang lebih substantif. Orientasi inilah yang membedakan *compliance-based quality* dari *improvement-based quality*.

Strategi Penguatan SNP sebagai Acuan Mutu Pendidikan

Penguatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, tetapi harus diarahkan pada pembangunan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Selama ini, implementasi SNP masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan, keterbatasan kompetensi pendidik, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta lemahnya budaya evaluasi di tingkat sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi penguatan SNP harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah, satuan pendidikan, pendidik, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (Tangi et al., 2026).

Strategi pertama yang perlu diperkuat adalah optimalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai instrumen implementasi SNP. SPMI memberikan kerangka operasional bagi sekolah untuk menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara

berkesinambungan. Melalui siklus tersebut, sekolah tidak hanya berupaya memenuhi indikator delapan standar, tetapi juga melakukan refleksi terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, SNP tidak lagi dipahami sebagai target administratif, melainkan sebagai instrumen yang mendorong budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) (Prapsetyo et al., 2026).

Strategi kedua adalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Sejumlah kajian literatur yang ditelaah cenderung menempatkan kualitas guru sebagai salah satu faktor yang paling banyak disoroti dalam keberhasilan implementasi SNP; namun demikian, karena kajian-kajian tersebut umumnya bersifat deskriptif atau studi kasus, klaim ini perlu dibaca sebagai kecenderungan yang muncul dalam literatur, bukan sebagai bukti urutan kausal yang teruji secara empiris. Pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang baik akan lebih mampu menerjemahkan standar nasional ke dalam proses pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik. Sebaliknya, rendahnya kompetensi guru akan menyebabkan standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan sulit dicapai secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan profesional berkelanjutan melalui pelatihan, coaching, mentoring, serta komunitas belajar guru perlu menjadi prioritas dalam strategi penguatan SNP (Pertiwi & Siahaan, 2026).

Strategi berikutnya adalah penguatan kepemimpinan kepala sekolah. Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai dalam kerangka *instructional leadership* yakni sebagai pemimpin perubahan yang menentukan arah implementasi SNP di tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek administratif, tetapi juga berperan dalam membangun visi mutu, mengembangkan budaya evaluasi, mengelola sumber daya secara efektif, serta mendorong inovasi pembelajaran. Kepemimpinan yang adaptif akan mempermudah integrasi delapan standar ke dalam perencanaan sekolah sehingga setiap program yang dijalankan memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan mutu pendidikan (Tangi et al., 2026).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan (*data-based decision making*). Penguatan SNP tidak dapat dilepaskan dari kemampuan sekolah memanfaatkan hasil evaluasi, rapor pendidikan, dan pemetaan mutu sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas. Sekolah yang mampu menggunakan data secara sistematis cenderung lebih cepat mengidentifikasi kelemahan, menetapkan prioritas perbaikan, dan mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, proses penjaminan mutu menjadi lebih objektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan (Agustin et al., 2026).

Strategi lainnya adalah penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Implementasi SNP tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada sekolah karena peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan, pendanaan, dan pendampingan, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap tata kelola lembaga, pendidik mengimplementasikan standar dalam proses pembelajaran, sedangkan masyarakat dan orang tua berkontribusi melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan (Babun et al., 2024).

Dengan demikian, strategi penguatan SNP masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masih kuatnya orientasi sekolah terhadap pemenuhan dokumen akreditasi dibandingkan dengan pembangunan budaya mutu, serta penguatan SNP harus bergeser dari paradigma *compliance-based quality* menuju *improvement-based quality*. Paradigma pertama menempatkan standar sebagai kewajiban yang harus dipenuhi agar memperoleh pengakuan administratif, sedangkan paradigma kedua memandang standar sebagai instrumen untuk mendorong inovasi, pembelajaran organisasi, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Pergeseran paradigma tersebut menjadi sangat penting agar SNP benar-benar berfungsi sebagai acuan mutu pendidikan nasional.

Implikasi lainnya adalah perlunya membedakan antara evaluasi kepatuhan dan evaluasi perbaikan. Evaluasi kepatuhan menjawab pertanyaan apakah persyaratan telah dipenuhi, sedangkan evaluasi perbaikan menjawab pertanyaan apa yang berubah setelah standar diterapkan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Keduanya tetap diperlukan, tetapi orientasi kedua harus diperkuat agar SNP tidak berhenti sebagai instrumen

administratif. Dalam perspektif manajemen mutu, evaluasi yang bermakna menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Karena itu, setiap hasil evaluasi idealnya diikuti dengan rencana tindak lanjut, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan jadwal peninjauan ulang. Pola ini membuat siklus mutu berlangsung secara berulang dan memungkinkan organisasi belajar dari hasil pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sintesis literatur, Standar Nasional Pendidikan (SNP) tidak hanya berfungsi sebagai acuan normatif, tetapi juga dapat menjadi kerangka bagi proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan utama implementasi SNP terletak pada kesenjangan antara pemenuhan standar secara formal dan penerapannya dalam praktik. Delapan SNP perlu dipahami sebagai satu sistem yang saling berkaitan dan diintegrasikan dengan SPMI, budaya mutu, serta *continuous quality improvement* agar hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Kontribusi kajian ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas SNP tidak cukup dilihat dari ketercapaian indikator, tetapi dari kemampuan satuan pendidikan mengubah standar menjadi proses evaluasi, pengambilan keputusan, dan perbaikan mutu. Secara praktis, penguatan SPMI, kepemimpinan sekolah, kompetensi pendidik, pemanfaatan data, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat menjadi aspek pendukung dalam implementasi SNP. Namun, karena penelitian ini merupakan *library research*, hubungan kausal antar-aspek tersebut belum dapat disimpulkan. Penelitian selanjutnya perlu menguji secara empiris hubungan antara implementasi SNP dan SPMI dengan indikator mutu pendidikan pada berbagai konteks satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adien, R., Amjad, H., Sukirman, Marlina, L., & Febriyanti. (2025). Transformasi Pendidikan Berkualitas: Faktor Pendukung Dan Strategi Peningkatan Mutu. *Irfani: Jurnal Pendidikan Islam*, 21(1), 75–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/ir.v21i1.6245>
- Agustin, N. A. M., Rohmah, L., Rohim, F., Anto, S., & Arianto, D. (2026). Strategi Pemetaan Mutu Pendidikan Berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Yogyakarta. *IJAR: Indonesia Journal of Action Research*, 5(1), 107–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ijar.2025.51-07> Strategi
- Arisandy, D., & Lubis, W. (2024). Implementasi Percepatan Kebijakan Dan Mutu Pendidikan (Penerapan Delapan Standar Pendidikan Nasional di SMK Penerbangan Angkasa Nasional (SPAN) Medan). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(8), 631–637. <https://doi.org/doi.org/jebma.v4n2.3828>
- Asmara, Q. (2021). Implementasi Kebijakan Dan Mutu Pendidikan (Penerapan Delapan Standar Pendidikan Nasional di SMA Mutiara Bunda Kecamatan Arcamanik Kota Bandung). *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 2(1), 119–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/kais.2.1.119-125>
- Athirah, F., Giyandita, F. S., & Abdurrahmansyah. (2025). Evaluasi Efektivitas Standar Proses Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(3), 832–845. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i3.7295>
- Babun, Hefniy, Aini, N., & Wardi, M. (2024). The Role of Stakeholders in the Management of Islamic Education : A Collaborative Approach to Education Quality. *MANAGERE: Indonesian Journal of Educational Management*, 6(3), 395–406. <https://doi.org/https://doi.org/10.52627/managere.v6i3.769>
- Dedik, Wibowo, A., Dewi, D. K., & Edith, I. R. (2025). Standar Nasional Pendidikan dan Akreditasi Sekolah / Madrasah. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 02(01), 557–562. <https://doi.org/https://doi.org/10.61253/epzeca47>
- Felisa, A. S., Zahra, N. L., Windasari, & Cindy, A. H. (2024). Penjaminan Mutu Tenaga Kependidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SMPN 34 Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 3(20), 188–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpion.v3i1.238>
- Fiandi, A., & Sesmiarni, Z. (2023). Implementasi standar mutu dan sasaran mutu pada lembaga pendidikan. *EDUTEACH: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Pembelajaran*, 4(1), 34–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/eduteach.v4i1.4431>
- Fikri, A. K., Fitri, A. Z., & Muhajir, A. (2025). Analisis Penerapan SNP dan SNPT sebagai Upaya

- Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Aqobah. *AL MIDAD : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 1(2), 145–161.
- Henry, Hafel, M., & Darmanto. (2025). Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Di SMP Negeri 1 Mentarang, Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(10), 3628–3637. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i10.2948>
- Heriyadi, Rahmi, I., Sulistiawan, E., Kusmiran, A. H., & Sulistiyana. (2025). Systematic Literature Review: Identifikasi Gap Dan Kelemahan Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Periode 2015-2024. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 745–759. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i3.28734>
- Indah, S. W., Miyono, N., & Haryati, T. (2024). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Berbasis Evaluasi Diri Sekolah (Eds) Di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 13(2), 261–268. <https://doi.org/10.26877/jmp.v13i2.15335>
- Jumadi, A., Tirta, S. D., & Ali, A. (2025). Konsep Mutu Dalam Pendidikan Standar Dan Metode Peningkatan. 27 November, 1–14.
- Maulana, M. M., & Suwadi. (2024). Integrasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan standar mutu pengelolaan pendidikan di sekolah. *JURNAL IDAARAH*, VIII(2), 304–315. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v8i2.48976>
- Mesiono, Nasution, P. M. G., Napihah, M. A., & Hidayat, R. (2022). Implementation Of National Education Standards In Improving The Quality Of Education Mesiono,. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 1221–1236. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2827>
- Pertiwi, D. I., & Siahaan, D. R. P. (2026). Kompetensi Guru dan Kualitas Pembelajaran: Kajian Literatur Sistematis Periode 2021-2025. *JURNAL BASICEDU*, 10(3), 1052–1063. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i3.12247>
- Prapsetyo, A., Lestari, K., Raharjo, T., & Suparyana. (2026). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Berbasis Pppep Dalam Pendidikan Taruna Akademi Militer. *Jurnal Mahatvavirya*, 13(1), 42–47. <https://doi.org/10.63824/mahatvavirya>
- Safitri, Y., & Julaiha, S. (2026). Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah. *Andragogi Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.31538/adrg.v6i1.2691>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA Milya. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sihombing, A., Tamba, G. P. A., & Siagian, K. D. (2026). Achievement of National Education Standards as an Indicator of School Quality. *Journal of Educational Studies in Science, Technology, Engineering, Arts and Humanities*, 1(2), 55–61. <https://doi.org/http://journal.lontaradigitech.com/FAMJ> <https://journal.globresco.com/index.php/JESTEAH> Achievement
- Sridana, N., Wilian, S., & Setiadi, D. (2018). Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA). *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 1(1), 45–51. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v1i1.212>
- Sulistiyanto, E., Mutohar, P. M., & Muhajir, A. (2023). Paradigma Baru Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(2), 263–286. <https://doi.org/10.24256/kelola.v8i2.3927>
- Tangi, H., Timan, A., & Ubaidillah, A. F. (2026). Analysis of the 2024 accreditation assessment instrument on school performance based on national education standards. *Jurnal Kependidikan*, 10(1), 10–22. <https://doi.org/10.21831/jk.v10i1.85671>